

ANATOMI KORUPSI DAN PERAN PENDIDIKAN: UPAYA MENGURAI BENANG KUSUT KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN

*Mujib Ridlwan*¹

Abstract: *There are two topics in this paper, what is the anatomy of corruption, in which it raises a question of how corruption can be mushrooming in Indonesia and how to heal the ulcers of corruption. And what is the role of education in combating corruption? There are three (3) important aspects in understanding the anatomy or basic framework of corruption, (a) the monopoly of power; (b) the unlimited authority or discretion, and (c) no clear accountability or responsibility. The trigger of the corrupt behavior is due to such factors economy, opportunities and low morality. The role of education in the field of combating corruption is to improve moral quality. Education here does not mean such a school educational institution. It is also related to the education gained from households and the environment (home or working places).*

Keywords: *Anatomy of corruption, the role of education*

Pendahuluan

Korupsi dalam kurun satu dekade terakhir sangat mendominasi pemberitaan surat kabar dan media elektronik. *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), sebuah lembaga yang berbasis di Hongkong, membeberkan hasil survei yang menyebutkan Indonesia sebagai negara paling korup di antara 16 negara se Asia Pasifik. Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada tahun 2010. Nilai tersebut melonjak naik dari tahun sebelumnya dengan angka 7,69. Sedangkan posisi kedua ditempati Kamboja diikuti oleh Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Taiwan, Korea, Macau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong dan Australia. Mereka semua termasuk Negara paling korup dalam survey, selain Singapura.²

Para pelakunya (mereka yang sedang berstatus tersangka atau sudah berstatus terdakwa, dan terpidana) bukan orang-orang yang berpendidikan rendah, melainkan rata-rata orang-orang yang berpendidikan tinggi, setidaknya sudah berstatus sarjana.

Jika korupsi ini dianalogkan sebuah penyakit, maka itu merupakan penyakit yang sudah sangat kronis. Untuk proses penyembuhannya membutuhkan sejumlah dokter spesialis. Karenanya, sebelum memutuskan melakukan penyembuhan, sang dokter harus benar-benar teliti dalam mendiagnosa penyakit sang pasien.

Maka semua ‘dokter’, mulai ‘dokter’ spesialis penegak hukum (KPK, Polisi, Jaksa, dan Hakim) sampai dokter spesialis di bidang pendidikan (dosen, guru, ustadz, dan keluarga) harus turun tangan melakukan proses penyembuhan penyakit kronis, korupsi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam berbangsa dan bermasyarakat.

Bagaimana pendidikan memerankan diri sebagai dokter penyembuh korupsi. Para pendidik tidak bisa mengelak untuk tidak ikut andil dalam penyembuhan penyakit ‘korup’ yang sudah kronis. Karena peran pendidikan, salah satunya menjadikan sarana menciptakan manusia berbudi luhur.

Mulyasa menegaskan, perwujudan manusia yang berkualitas tersebut menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek

¹ STAI Al Hikmah Tuban, Email : cak_mujib_ridlwan@yahoo.com

² [http://korupsi.vivanews.com/news/read dimuat kompasiana.com](http://korupsi.vivanews.com/news/read%20dimuat%20kompasiana.com), penulis; Herdiansyah Hamzah, 16/1/2011

yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing-masing. Hal tersebut diperlukan, terutama untuk mengantisipasi era kesejahteraan, khususnya globalisasi pasar bebas di lingkungan Negara-negara ASEAN, seperti AFTA (Asean Free Trade Area), dan AFLA (Asean Labour Area), maupun di kawasan Negara-negara Asia Pasifik (APEC).³

Dalam UUSPN No 20 Tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".⁴

Melihat fungsi yang dibebankan pemerintah kepada lembaga pendidikan, yakni membentuk watak peserta (santri, siswa dan mahasiswa) menjadi orang-orang bermartabat, beriman dan bertakwa, tentu bisa dikatakan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata berhasil dengan menggunakan kaca besar "korupsi di Indonesia masih menempati urutan nomor *wahid* se Asia Pasifik".

Ada dua bahasan dalam tulisan ini, bagaimana anatomi korupsi, yang didalamnya memunculkan pertanyaan bagaimana korupsi itu bisa menjamur di Indonesia dan bagaimana cara menyembuhkan borok korupsi. Dan seperti apa peran dunia pendidikan untuk memberantas korupsi?

Anatomi Korupsi

Sebelum jauh membahas tentang anatomi korupsi, sebaiknya ada pemahaman bersama tentang korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin *corupto cartumpen* yang berarti; busuk atau rusak. Korupsi ialah perilaku buruk yang dilakukan oleh pejabat public secara tidak wajar atau tidak legal untuk memperkaya diri sendiri.

Menurut perspektif hukum, pengertian korupsi secara gamblang dijelaskan dalam UU No 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Pengertian korupsi secara hukum dijelaskan, merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan public atau masyarakat luas.

Secara garis besar, unsur-unsur yang termasuk dalam bingkai korupsi adalah (a) perbuatan melawan hukum, (b) penyalahgunaan kewenangan, dan (c) merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Adapun dampak negative yang ditimbulkan adalah;

- a. Berkurangnya kepercayaan public terhadap pemerintah
- b. Menurunnya pendapatan Negara.
- c. Hukum tidak lagi dihormati.

Adapun bentuk pidana yang diberikan kepada pelaku korupsi adalah: (a) pidana mati, bagi orang yang melawan hukum atau merugikan Negara (perekonomian). (b) pidana penjara, seumur hidup atau paling singkat 20 tahun. (c) perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan anatomi, berasal dari dua kata, yaitu Ana yang berarti menguraikan dan Tomy berarti memotong. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh manusia dengan jalan menguraikan dan memotong bagiannya.

³E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung :Rosda Karya, 2004), 3.

⁴ UU Sisdiknas, (Bandung : Citra Umbara, 2003), 7.

⁵ WWW.UNJABISNIS.NET, diposkan Samsul Maarif, 14/1/2011

Dengan demikian yang penulis maksudkan dengan Anatomi Korupsi adalah ilmu yang mempelajari susunan, sel-sel atau elemen yang membuat suburnya korupsi.

Mengapa tiba-tiba muncul budaya korupsi yang sudah sangat menggurita? Pertanyaan ini sampai sejauh ini masih mendapatkan jawaban yang berbeda dari banyak kalangan. Ada yang mengatakan, penyebab korupsi ini karena moralitas rendah dan gaji (salary) kecil. Dua hal itu, menjadi kambing hitam.

Tetapi dibalik itu, terdapat banyak factor yang membuat korupsi subur. Salah satunya adalah ‘dominasi kekuasaan’ yang tanpa ada kontrol hingga menyebabkan sangat mudah korupsi dilakukan atas nama wewenang dan jabatan.

Hakikatnya, kekuasaan yang tidak terbatas akan mengakibatkan dominasi dan hegemoni yang kuat terhadap kepentingan mayoritas. Hal inilah yang menjadi factor penting yang menyuburkan budaya korupsi.⁶

Sejalan dengan hal tersebut, Robert Klitgaard (1988),⁷ menjelaskan, bahwa, “perilaku haram berkembang saat pelaku memiliki kekuatan monopoli atas klien, ketika pelaku memiliki diskresi atau kewenangan yang tidak terbatas, dan ketika akuntabilitas pelaku kepada pimpinan lemah. Hal tersebut memiliki kesamaan: korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi, minus akuntabilitas”.

Apa yang dikatakan Klitgaard itu, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek penting dalam memahami anatomi atau kerangka dasar terjadinya korupsi. (1) adanya monopoli kekuasaan, (2) adanya kewenangan atau diskresi yang tidak terbatas, dan (3) tidak ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang jelas.

Ingin Menggeser Kelas Sosial

Semua kejahatan itu terjadi karena pelakunya sedang berburu kelas social. Marx memberikan penjelasan tentang konsep kelas dengan membaginya menjadi tiga kelas masyarakat dalam struktur masyarakat kapitalis. (1) buruh upahan, (2) kapitalis, dan (3) pemilik tanah. Kelas-kelas ini dibedakan terutama karena perbedaan-perbedaan dalam sumber-sumber pendapatan pokok, yakni upah bagi buruh upahan, keuntungan bagi kaum kapitalis, dan sewa tanah bagi pemilik tanah..

Kini kelas social itu berangsur-angsur terbagi menjadi dua, yakni kelas borjuis (berduit) dan kelas proletariat (kaum ekonomi bawah). Marx membaginya, kaum borjuis menjadi dua bagian, yakni borjuis dominas (kapitalis besar dengan memiliki perusahaan-perusahaan besar) dan borjuis kecil (terdiri dari pengusaha-pengusaha toko, pengrajin-pengrajin kecil, dan sebagainya).⁸

Di awal *Communist Manifesto*, Marx mengatakan:m“Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang bebas dan budak , bangsawan dan rakyat biasa, tuan dan hamba, pemimpin perusahaan dan orang luntang-lantung, dalam satu kata, penindas dan yang ditindas, selalu bertentangan satu sama lain, yang berlangsung tak putus-putusnya dalam satu pertarungan yang kadang-kadang tersembunyi, kadang-kadang terbuka, suatu pertarungan yang setiap kali berakhir, baik dalam satu rekonstitusi masyarakat pada umumnya secara revolusioner, maupun dalam keruntuhan umumnya dari kelas-kelas yang berecekcok ini.”⁹

⁶<http://kormonev.menpan.go.id> dalam kompasian.com. Ditulis, Hardiansyah Hamzah, dalam artikelnya, Membongkar Jejak Budaya Korupsi di Indonesia.

⁷ Ulul Albab, MS, dalam artikel yang berjudul “Model Anti Korupsi Becker dan Klitgaard, hal 4, diakses melalui website www.unitomo.ac.id.

⁸ Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I, diterjemahkan Robert M.Z Lawang (Jakarta: PT Gramedia, 1986), 148

⁹ *Ibid.*, 146.

Korupsi terjadi karena seseorang ingin menggeser status kelasnya dari proletariat ke borjuis, dari rakyat biasa menjadi bangsawan, dari hamba menjadi tuan, dari luntang-lantung menjadi pemimpin perusahaan, dari ditindas menjadi penindas.

Sayangnya, keinginan menggeser kelas itu tidak dibarengi dengan usaha keras, tetapi inginnya pintas dan cepat memperoleh kelas yang didambakan itu segera ada di genggaman tangannya. Akibatnya, proses upaya menggeser kelas itu menjadi jungkir balik dan membahayakan diri sendiri dalam ranah hukum.

Mengapa tiba-tiba pelaku korupsi itu tersadarkan akan kelasnya yang berada di bawah? Karena pelaku korupsi terjalin komunikasi dengan kehidupan orang-orang borjuis. Mereka para pelaku korupsi melakukan komunikasi, baik dengan cara sadar atau tidak sadar, sehingga menciptakan kecemburuan. Marx memberikan contoh sederhana, ketika kaum proletar itu cukup puas tinggal di rumah sederhana, tetapi tiba-tiba kepuasan itu berontak saat menyaksikan sebuah ‘istana’ dibangun megah disamping rumahnya. Inilah yang membuat korupsi di Indonesia itu menjamur. Pemicunya karena kondisi ekonomi masyarakat masih *jomplang*—belum merata--.

Kalau menggunakan pisau analisa ‘Kelasnya Marx’ berarti penyebab masih banyaknya korupsi di negeri ini karena persoalan tidak meratanya pendapatan, tanpa memasukkan faktor moral pelaku korupsi dan faktor ‘kekuasaan tanpa kontrol’.

Menurut analisa penulis dengan mengambil sejumlah teori di atas, penyebab terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga faktor. Ketiganya adalah ekonomi, kekuasaan atau wewenang tanpa kontrol, dan rendahnya moralitas.

Ketiganya tidak bisa dipisah-pisahkan, karena ketika seseorang memiliki kekuasaan atau wewenang tanpa kontrol dan kekuatan ekonomi keluarganya menengah ke bawah, tetapi moralitasnya tinggi, tidak akan terjadi korupsi.

Ketiganya memang saling mengait, tetapi dari tiga faktor tersebut yang paling dominan mampu mengontrol tindak kejahatan korupsi adalah faktor moralitas. Pertanyaannya, siapa yang berada di garda depan untuk menata moralitas anak bangsa agar tidak lagi terdengar kata korupsi di 20-25 tahun mendatang? Jawabannya, pendidikan. Berarti pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk membendung gerak korupsi.

Bagaimana Peran Pendidikan

Apakah memungkinkan korupsi dibendung lewat dunia pendidikan. Jawabannya, bisa dengan catatan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan berbasis kelas, keluarga dan lingkungan. Tiga pilar pendukung suksesnya pendidikan itu harus berjalan bersama-sama. Tapi jika pendidikan yang dimaksud hanyalah pendidikan formal (sekolah) diyakini sangat berat—apalagi pendidikan yang hanya mengedepankan pengajaran (transformasi ilmu saja tanpa dibarengi dengan teladan dari guru dan dosen).

1. Kontrol berbasis kelas

Pendidikan berbasis sekolah ini sangat mungkin membantu mengentaskan borok korupsi di negeri ini. Caranya, kurikulum digeser menjadi kurikulum yang tidak sekedar memberikan pemahaman atau mentransformasikan ilmu belaka (selanjutnya disebut **pengajaran**), tetapi sekaligus memberikan teladan (pendidikan), dengan memasukkan kurikulum berbudi pekerti, terutama berbudi pekerti dalam berbangsa dan bernegara. Selama ini, budi pekerti masih berkulat, bagaimana bersikap kepada orangtua, teman, dan tetangga. Sementara budi pekerti dalam bernegara sama sekali tidak disinggung dalam kurikulum. Kalaupun ada, hanya diajarkan bagaimana cara bermusyawarah, cara berdemokrasi.

Kelebihan pendidikan berbasis sekolah dalam memberantas korupsi adalah ketika siswa sudah dewasa nanti akan menumbuhkan rasa malu yang sangat kuat untuk melakukan

tindakan korupsi. Sedangkan kelemahannya, membutuhkan waktu yang panjang untuk menghentikan borok korupsi, karena siswa yang dididik sekarang setidaknya membutuhkan waktu 10-15 tahun ke depan mereka menjadi pemimpin di instansi-instansi pemerintah dan partai-partai politik.

2. Kontrol berbasis keluarga

Faktor kedua untuk memberantas korupsi adalah bisa dilakukan melalui pendidikan berbasis keluarga. Bagaimana caranya?. Ketika masih anak-anak, pesan-pesan moral tentang nilai-nilai dan moral. Orangtua bisa saja memberikan penjelasan bahwa mengambil barang yang bukan haknya merupakan sesuatu yang tidak saja dilarang oleh agama, juga oleh hukum positif. Dalam hal ini, orangtua yang paling memiliki peran penting.

Ketika anak sudah dewasa dan sudah berkeluarga, tetap pendidikan berbasis keluarga masih menjadi penting untuk membendung tindakan korupsi. Bedanya, bukan lagi orangtua yang berperan mengontrol tindakan jahat itu, melainkan pasangan dari suami-istri. Jika suaminya yang memiliki peluang untuk korupsi, maka suami yang berfungsi sebagai control. Begitu juga sebaliknya.

Keluarga seperti ini selain selamat dari jeratan hukum korupsi, juga bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya. Tidak sedikit perempuan-perempuan berkarir yang berurusan dengan hukum karena tindakan korupsi.

3. Kontrol berbasis lingkungan

Kontrol berbasis lingkungan ini, bisa lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat kerja. Tetapi biasanya kontrol berbasis lingkungan ini sangat jarang di lingkungan, terutama kontrol berbasis lingkungan tempat tinggal. Tetangga tidak akan berani mengatakan kepada tetanggannya yang sedang melakukan korupsi, karena dianggap akan berbenturan dengan kaidah-kaidah 'privasi seseorang'.

Begitu juga kontrol berbasis tempat kerja akan mengalami hal serupa, kecuali di tempat kerja itu dibentuk badan pengawas yang memang bertugas mengawasi kinerja dan akuntabilitas keuangan. Di Pemrov, Pemkab atau Pemkot, memang ada namanya Badan Pengawas, tetapi lembaga itu belum menunjukkan fungsi kontrolnya dengan baik.

Begitu juga di sebuah Perguruan Tinggi seharusnya memiliki lembaga pengawas, sekarang ada namanya Lembaga Pengendali Mutu (LPM) yang berfungsi mengontrol semua aktifitas kampus, termasuk mengawasi keluar-masuknya keuangan. Jika lembaga-lembaga pengawas itu memfungsikan diri dengan sangat baik, bisa dipastikan korupsi berangsur-angsur akan menyusut dan sembuh.

Tiga basis pendidikan untuk membendung tindakan korupsi ini adalah merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Bagaimana dengan yang sudah terjadi, itu bukan lagi menjadi lahan garap pendidikan, melainkan masuk wilayah hukum.

Tiga pilar pendidikan yang berfungsi sebagai tempat untuk mengontrol tindakan korupsi ini sekaligus mengukuhkan aliran Konvergensi. Aliran yang digagas seorang filosof asal Jerman, Louis William Stern, ini menyebutkan bahwa yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah merupakan penggabungan dua aliran, yakni Nativisme (berbasis gen atau keturunan dan keluarga) dan Empirisisme (berbasis lingkungan).

Itu berarti ada dua factor yang bisa mempengaruhi perilaku manusia, pengaruh keluarga dan lingkungan (bisa lingkungan sekolah, tempat tinggal dan tempat kerja). Dua hal itu merupakan keharusan bagi keluarga, dengan cara lisan dan sekaligus memberikan contoh dalam kehidupan keluarga. Kerena banyak kasus anak-anak nakal dari keluarga broken home yang kemudian ketika dewasa punya prinsip beda,--yang penting kaya tidak peduli barang siapa yang ambil--.

Dalam keluarga broken home, meski orangtua sesekali memberikan nasihatnya melalui lisan tentang hal-hal yang baik, tetapi anak tidak melihat teladan pada diri kedua orangtuanya. Maka kemudian, ia mencari pelarian ke lingkungan-lingkungan yang tidak baik atau kurang baik.

Ketika anak masih dalam bimbingan orangtua, teladan dan nasihat sangat penting dari kedua orangtuanya. Sebaliknya, jika anak sudah dewasa dan berkeluarga, maka antarpasangan suami-istri perlu saling mengingatkan agar tidak melanggar norma agama dan aturan pemerintah, melakukan korupsi. Dengan begitu pendidikan dalam keluarga berperan sangat penting untuk membendung agar seseorang tidak punya pikiran korup.

Sementara lembaga pendidikan formal (sekolah) selain berkawajiban memberikan pengajaran juga sekaligus memberikan pendidikan. Istilah pengajaran dan pendidikan itu memiliki arti dan implikasi berbeda. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, istilah Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Sedangkan pengajaran dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang paling mempengaruhi antara guru dan siswa

Dalam pendidikan, guru atau dosen bukan sekedar mentransformasikan ilmu pengetahuan, melainkan juga memberikan teladan melalui tindakan. Sementara pengajaran hanya sebatas mentransformasikan ilmu, tanpa dituntut untuk memberikan teladan. Yang paling tepat untuk membendung tindakan korupsi adalah kegiatan mendidik, bukan mengajar. Kalau pendidikan (bukan semata pengajaran) yang diterapkan, berarti dosen, guru, dan ustadz harus mentransformasikan ilmu dan sekaligus memberikan contoh untuk tidak bertindak korupsi.

Bagaimana jika dari sisi keturunan dan lingkungan tidak mendukung bahwa seseorang harus bertindak jahat, seperti melakukan korupsi?. Abraham Maslow memberikan jawabannya melalui teorinya yang sangat terkenal *Hierarchy of Need* (Hirarki kebutuhan). “Abraham Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarkis.”¹⁰

Ia lebih lanjut mengemukakan, bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Adapun hirarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut: (a) Kebutuhan fisiologis/dasar. (b) Kebutuhan akan rasa aman dan tenteram. (c) Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. (d) Kebutuhan untuk dihargai. (e) Kebutuhan untuk aktualisasi diri.¹¹

Dari lima hirarki kebutuhan yang disampaikan Maslow itu, kebutuhan “c, d, dan e” merupakan kebutuhan yang bisa memicu seseorang melakukan tindak kejahatan seperti melakukan korupsi. Sedangkan kebutuhan “a dan b”, masih tergolong kebutuhan dasar yang bisa dipenuhi tanpa melakukan korupsi.

Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi; merupakan kebutuhan yang sekarang lebih cenderung pada materi. Suami yang bisa memberikan materi di atas rata-rata dari tetangganya, ia bakal dicintai dan disayangi---bahkan **sangat** dicintai dan **sangat** disayangi---oleh anggota keluarganya.

¹⁰ Iskandar, *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru*. (Jakarta, Gaung Persada Pers, Maret 2009), 115

¹¹ *Ibid.*, 115-116

Logika terbaliknya, ketika suami tidak mampu memberikan nafkah berlebih kepada anggota keluarganya atau bahkan kurang dari kebutuhan, maka rasa sayang dan cinta dari pasangan akan mengalami penurunan. Untuk bisa mendapatkan kasih sayang dan cinta dari pasangan, sekarang mengalami pergeseran kepada materi (tidak cukup hanya menunjukkan sebuah sikap perhatian).

Karena kebutuhan dicintai dan disayangi ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia, sementara untuk mendapatkan kebutuhan itu harus memenuhi kebutuhan orang-orang yang diharapkan cinta dan sayangnya dengan uang, maka orang bersangkutan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang. Bagi yang moralitasnya baik, akan mencari uang dengan cara yang benar dan halal. Tetapi sebaliknya, bagi yang moralitasnya *jeblok*, ia akan mencari uang dengan cara jalan pintas.

Kebutuhan untuk dihargai; kebutuhan kedua yang memicu terjadinya korupsi adalah kebutuhan untuk dihargai dan ingin mulia di depan kawan sejawat, tetangga, dan lawan. Kebutuhan untuk dihargai merupakan kebutuhan hampir setiap orang, kecuali orang-orang *khos*. Orang-orang *khos* itu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhannya, sehingga tidak lagi punya pikiran ingin dimuliakan makhluk.

Salah satu contoh, Ibnu Athoillah dalam kitabnya *Al Hikam*, menyebut, “Apabila engkau menghendaki suatu kemuliaan yang tidak bisa sirna, maka janganlah memuliakan suatu yang bisa rusak (makhluk),”¹²

Tidak butuh dihargai orang lain itu hanyalah orang-orang tertentu yang bisa melaksanakan. Hampir semua orang butuh untuk dihargai orang lain. Untuk bisa dihargai, konsekwensi logisnya adalah ketika teman sejawat, tetangga atau bahkan lawan membutuhkan sesuatu, orang tersebut bisa memenuhinya. Uang masih menjadi kebutuhan yang paling dominan, dibanding kebutuhan-kebutuhan lain. Karenanya, begitu ada peluang dengan memainkan uang Negara, maka seseorang akan dengan sangat mudah tergoda untuk mengambil uang itu dengan cara tidak benar.

Kebutuhan aktualisasi diri; aktualisasi diri diperlukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hampir semua orang butuh aktualisasi diri untuk menunjukkan jati dirinya. Aktualisasi diri ini bisa diwujudkan selain dengan uang juga dengan kecerdasan dan keterampilan. Tetapi bagi sebagian orang yang menunjukkan aktualisasi dirinya dengan menggunakan materi, lebih banyak peluang menjadi korup—jika ada kesempatan untuk korup.

Para pejabat dan anggota dewan yang korup itu adalah mereka yang ingin keberadaannya diakui oleh orang. Bahkan tidak jarang politisi yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk biaya iklan sebagai bentuk upaya beraktualisasi diri.

Ketika ia sudah diakui keberadaannya, maka selanjutnya akan berusaha untuk mengembalikan semua biaya yang sebelumnya digunakan sebagai aktualisasi diri. Contoh lain, bagaimana para politisi yang ingin beraktualisasi diri melalui parpol dengan berusaha menjadi pimpinan parpol. Tindakan banyak orang sekarang ini adalah dengan membagi-bagi uang agar ia dipilih menjadi pimpinan di parpol itu. Ketika sudah menjadi pimpinan, ia berusaha mengembalikan uang yang dihambur-hamburkan untuk aktualisasi (proses menjadi pimpinan partai) dengan cara tidak sehat, korupsi.

Kesimpulan

1. Terdapat 3 (tiga) aspek penting dalam memahami anatomi atau kerangka dasar terjadinya korupsi. (a) adanya monopoli kekuasaan, (b) adanya kewenangan atau diskresi yang tidak terbatas, dan (c) tidak ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang jelas.

¹² Ibnu Atha'illah, *Intisari Kitab al Hikam*, diterjemah Abu Fajar Al Qalami. (Gitamedia Pers, 2005), 141.

2. Pemantik perilaku korup, karena ekonomi, ada kesempatan dan rendahnya moralitas.
3. Bidang garap pendidikan dalam keikutsertaanya memberantas korupsi adalah meningkatkan kualitas moral.
4. Pendidikan di sini tidak berarti sempit, lembaga pendidikan sekolah---lebih dari itu pendidikan yang didapat dari rumah tangga, dan lingkungan (tempat tinggal maupun lingkungan tempat bekerja).

Daftar Rujukan

- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, diterjemahkan Robert M.Z Lawang (Jakarta, PT Gramedia, 1986).
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung :Rosda Karya, 2004).
- Ibnu Atha'illah, Intisari Kitab al Hikam, diterjemah Abu Fajar Al Qalami. (Gitamedia Pers, 2005),
- Iskandar, *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru*. (Jakarta, Gaung Persada Pers, Maret 2009).
- UU Sisdiknas, (Bandung : Citra Umbara, 2003).
- <http://korupsi.vivanews.com/news/read> dimuat kompasiana.com, penulis; Herdiansyah Hamzah, (16/1/2011)
- <http://kormonev.menpan.go.id> dalam kompasian.com. Ditulis, Hardiansyah Hamzah, dalam artikelnya, *Membongkar Jejak Budaya Korupsi di Indonesia*.
- www.unitomo.ac.id. Dr. Ulul Albab, MS, dalam artikel yang berjudul "Model Anti Korupsi Becker dan Klitgaard.
- WWW.UNJABISNIS.NET, diposkan Samsul Maarif, (14/1/2011).